

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan fenomena sosial yang mempertemukan masyarakat lokal dengan wisatawan dalam suatu ruang interaksi yang menghasilkan berbagai perubahan sosial dan budaya. Dalam perspektif antropologi, pariwisata tidak hanya dipahami sebagai aktivitas perjalanan ataupun sektor ekonomi, tetapi sebagai proses sosial yang melibatkan pertukaran nilai, identitas budaya, relasi kekuasaan, serta negosiasi kepentingan di antara berbagai aktor yang terlibat. Kehadiran wisatawan membawa praktik, pengetahuan, dan cara pandang baru yang berinteraksi dengan kehidupan masyarakat lokal sehingga memengaruhi cara masyarakat memanfaatkan ruang, membangun hubungan sosial, dan mempertahankan identitas budayanya (Smith, 1989).

Dalam kajian antropologi, masyarakat lokal bukan hanya diposisikan sebagai objek yang menerima dampak perkembangan pariwisata, tetapi sebagai subjek yang memiliki pengetahuan lokal, nilai budaya, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Smith (1989) menjelaskan bahwa hubungan antara wisatawan (guest) dan masyarakat lokal (host) selalu membentuk dinamika sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, Pitana dan Gayatri (2005:109) menyatakan bahwa masyarakat lokal merupakan *host society*, yaitu pihak yang secara langsung mengalami dampak sosial, budaya, ekonomi, maupun lingkungan akibat aktivitas pariwisata. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan suatu destinasi tidak hanya diukur melalui

meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga melalui sejauh mana masyarakat lokal memperoleh ruang untuk berpartisipasi dan mempertahankan kehidupan sosial budayanya.

Pengembangan pariwisata melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan peran yang berbeda, seperti pemerintah, pelaku usaha, wisatawan, dan masyarakat lokal. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta sebagai pengembang usaha, sedangkan masyarakat lokal berperan sebagai pemilik ruang sosial sekaligus pelaku utama dalam keberlanjutan destinasi (Theresia Hardi, 2025:1). Oleh karena itu, pengembangan pariwisata memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan (Wulandari et al., 2020). Pendekatan tersebut selaras dengan konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan pariwisata (Suansri, 2003).

Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar dan beragam. Potensi tersebut didukung oleh keindahan alam, kekayaan budaya Minangkabau, arsitektur tradisional, serta jejak sejarah kolonial yang masih dapat dijumpai di berbagai kawasan. Kondisi ini menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor strategis yang dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis budaya dan sumber daya lokal. Salah satu destinasi yang memiliki potensi besar dalam konteks ini adalah

Objek Wisata Gunung Padang yang terletak di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang (Sari et al., 2025:1731).

Gambar 1. 1 Objek Wisata Gunung Padang



Sumber : Dok. Kabapedia.com (2023)

Gunung Padang merupakan salah satu objek wisata unggulan Kota Padang yang memiliki karakteristik khas karena memadukan unsur alam, budaya, dan sejarah dalam satu kawasan. Secara geografis, Gunung Padang berada pada ketinggian sekitar ± 80 mdpl yang memungkinkan pengunjung menikmati panorama laut lepas, kawasan pesisir, serta lanskap perkotaan dari puncaknya. Akses menuju kawasan ini melalui ratusan anak tangga yang sekaligus dimanfaatkan sebagai jalur tracking, sehingga menjadikan Gunung Padang sebagai ruang rekreasi dan olahraga berbasis alam (Dispar Kota Padang, 2025). Di samping itu, keberadaan legenda Siti Nurbaya memberikan makna simbolik yang kuat bagi kawasan ini, sementara peninggalan kolonial berupa bunker, meriam, dan battery peninggalan Jepang dan Belanda menambah daya tarik Gunung Padang sebagai wisata sejarah dan edukasi. Integrasi potensi alam, budaya, dan sejarah tersebut menjadikan Gunung Padang sebagai destinasi yang tidak hanya menarik

secara visual, tetapi juga kaya akan nilai sosial dan kultural (Pitana & Gayatri, 2005:63).

Berbagai potensi yang dimiliki Gunung Padang telah mendorong berkembangnya berbagai aktivitas wisata, seperti wisata alam, wisata sejarah, fotografi, rekreasi, dan kegiatan edukasi. Perkembangan aktivitas wisata ini secara tidak langsung membuka ruang keterlibatan masyarakat sekitar dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial yang terkait dengan pariwisata, seperti penyediaan jasa parkir, penjualan makanan dan minuman, jasa pemanduan, serta pemeliharaan kawasan wisata. Dalam konteks ini, pariwisata tidak hanya membentuk ruang konsumsi wisata, tetapi juga menjadi arena interaksi sosial yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat local (Cohen, 1984 dalam Aini, 2022:4). Dengan kata lain, perkembangan pariwisata di Gunung Padang membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Gunung Padang 2021-2024

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2021	8.013 Wisatawan
2022	15.393 Wisatawan
2023	22.320 Wisatawan
2024	49.287 Wisatawan

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, Objek Wisata Gunung Padang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Data Dinas Pariwisata Kota

Padang mencatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 8.013 orang pada tahun 2021 menjadi 49.287 orang pada tahun 2024 (Dinas Pariwisata Kota Padang, 2024). Peningkatan jumlah kunjungan ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap Gunung Padang terus bertumbuh, sekaligus menandakan besarnya potensi kawasan ini dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal secara berkelanjutan. Namun, peningkatan kunjungan juga menuntut adanya pengelolaan destinasi yang lebih terarah, karena semakin intensifnya aktivitas wisata dapat berdampak pada aspek kebersihan, kenyamanan, kelestarian lingkungan, pemanfaatan ruang, hingga dinamika sosial masyarakat sekitar.

Secara kelembagaan, pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai representasi pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan, penetapan kebijakan, dan fasilitasi pengembangan destinasi wisata. Namun demikian, pengelolaan pariwisata yang hanya bertumpu pada pemerintah tanpa keterlibatan aktif masyarakat lokal tidak akan mampu menjawab seluruh kebutuhan pengembangan destinasi secara berkelanjutan (Tosun, 2006:494). Masyarakat lokal memiliki pengetahuan terhadap lingkungan setempat, kepentingan langsung terhadap pemanfaatan ruang wisata, serta keterikatan social budaya yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan destinasi. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat melalui wadah kelembagaan lokal menjadi penting untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wisata.

Seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan berkembangnya aktivitas wisata di kawasan Gunung Padang, tumbuh pula kesadaran di kalangan

masyarakat setempat, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata di wilayahnya. Kondisi ini mendorong munculnya inisiatif untuk membentuk sebuah wadah yang dapat mengorganisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata. Melalui musyawarah yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh adat, dan instansi pemerintah setempat, dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gunung Padang yang kemudian ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kota Padang Nomor 35 Tahun 2022. Pembentukan Pokdarwis Gunung Padang merupakan respons terhadap kebutuhan pengelolaan destinasi yang lebih terorganisir, sekaligus mencerminkan penerapan prinsip Community Based Tourism (CBT) yang menempatkan komunitas lokal sebagai bagian penting dalam pengembangan pariwisata.

Pokdarwis merupakan kelembagaan masyarakat yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di wilayahnya. Dalam konteks Gunung Padang, Pokdarwis memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan wisata, tetapi juga sebagai wadah partisipasi masyarakat lokal, penghubung antara kepentingan warga dengan kebijakan pemerintah, serta penggerak sadar wisata di tingkat komunitas. Secara ideal, keberadaan Pokdarwis diharapkan mampu mendorong pengembangan atraksi wisata, pengelolaan kawasan, peningkatan promosi, pemberdayaan pelaku usaha lokal, penguatan kesadaran Sapta Pesona, hingga pelestarian lingkungan dan nilai sejarah yang melekat pada kawasan Gunung Padang. Dengan demikian, Pokdarwis tidak hanya

diposisikan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor lokal yang penting dalam pembangunan pariwisata berbasis komunitas.

Dalam praktiknya, Pokdarwis Gunung Padang telah menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata dan pelibatan masyarakat. Di bidang pengembangan produk wisata, Pokdarwis menginisiasi berbagai atraksi dan program seperti paket edutrip “Pahlawan Hutan”, wisata sejarah berbasis peninggalan kolonial, serta jasa pemandu wisata yang dikoordinasikan oleh anggota Pokdarwis. Di bidang pemberdayaan masyarakat, Pokdarwis mendorong keterlibatan warga melalui pelatihan, sosialisasi Sapta Pesona, dan fasilitasi pelaku usaha lokal seperti pedagang makanan dan minuman, jasa parkir, serta penjual souvenir. Di bidang promosi, Pokdarwis memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan Gunung Padang kepada khalayak yang lebih luas, sementara di bidang konservasi lingkungan Pokdarwis terlibat dalam kegiatan gotong royong, pengelolaan sampah, dan upaya menjaga kelestarian kawasan wisata. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki ruang peran yang cukup luas dalam pengembangan pariwisata Gunung Padang (Pokdarwis Gunung Padang, akun Instagram resmi, diakses 15 februari 2026).

Berbagai upaya yang dilakukan dalam pengembangan Gunung Padang memperoleh pengakuan lebih lanjut ketika kawasan ini ditetapkan sebagai Desa Wisata Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang melalui SK Wali Kota Nomor 78 Tahun 2023 dan terdaftar dalam sistem Jaringan Desa Wisata (Jadesta) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai desa wisata kategori rintisan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jadesta, 2023). Penetapan ini

menunjukkan bahwa Gunung Padang semakin dipandang sebagai kawasan yang potensial untuk dikembangkan melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Sekaligus, hal ini memperkuat posisi Pokdarwis sebagai salah satu aktor lokal yang diharapkan mampu mengambil bagian dalam penguatan kapasitas dan tata kelola destinasi wisata di tingkat local.

Meskipun demikian, dalam praktiknya peran Pokdarwis Gunung Padang dalam pengembangan objek wisata tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai hambatan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang aktif, rendahnya partisipasi sebagian anggota dan masyarakat, keterbatasan pendanaan mandiri, kendala fasilitas, serta dinamika koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis komunitas tidak hanya bergantung pada besarnya potensi wisata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kelembagaan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara peran yang secara ideal diharapkan dari Pokdarwis dan peran yang secara faktual dapat dijalankan di lapangan.

Melihat kompleksitas pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Padang tersebut, peran Pokdarwis sebagai kelembagaan lokal menjadi sangat penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Di satu sisi, Pokdarwis diharapkan mampu menjadi penggerak utama pelibatan masyarakat dan penghubung antara komunitas lokal dengan pemerintah dalam pengelolaan destinasi. Di sisi lain, Pokdarwis masih berhadapan dengan berbagai keterbatasan, baik dari segi kapasitas internal, dukungan struktural, maupun dinamika sosial di tingkat lokal yang

memengaruhi efektivitas peran yang dijalankannya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana peran Pokdarwis Gunung Padang benar-benar dapat mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam bagaimana peran Pokdarwis Gunung Padang dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Padang, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Kajian ini tidak hanya penting dalam konteks pengelolaan destinasi wisata di tingkat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih luas mengenai tata kelola pariwisata berbasis komunitas, penguatan kelembagaan lokal, dan upaya mewujudkan pembangunan pariwisata yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

B. Perumusan Masalah

Gunung Padang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan sekaligus ikon Kota Padang yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai aset daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, kawasan ini mengalami perkembangan aktivitas pariwisata yang semakin intens. Kondisi tersebut mendorong keterlibatan generasi muda dan masyarakat setempat untuk berperan aktif dalam pengembangan wisata di wilayahnya. Melalui proses diskusi yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh adat, serta instansi pemerintah, kemudian disepakati pembentukan Kelompok Sadar

Wisata (Pokdarwis) yang secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kota Padang Nomor 35 Tahun 2022 (Pricillia, 2023:64).

Pokdarwis Gunung Padang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan Objek Wisata Gunung Padang. Keberadaan Pokdarwis diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Namun, dalam praktiknya, peran Pokdarwis belum sepenuhnya berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas organisasi, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program menunjukkan adanya tantangan dalam menjalankan fungsi Pokdarwis sebagai aktor lokal dalam pengembangan wisata. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk memahami bagaimana peran Pokdarwis serta hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan peran tersebut dalam konteks pengembangan wisata Gunung Padang. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Padang?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dihadapi Pokdarwis dalam menjalankan perannya pada pengembangan Objek Wisata Gunung Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Padang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi Pokdarwis dalam menjalankan perannya dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian antropologi sosial, khususnya dalam memahami peran aktor lokal dan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang mengkaji partisipasi masyarakat, peran komunitas lokal, serta penerapan konsep Community Based Tourism (CBT) dalam konteks pariwisata. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran empiris mengenai dinamika sosial masyarakat lokal dalam proses pengembangan destinasi wisata.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan peran Pokdarwis dalam pengembangan Objek Wisata Gunung Padang. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh

Pokdarwis sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan dan strategi yang telah dijalankan. Bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan wisata yang melibatkan masyarakat lokal. Sementara itu, bagi masyarakat sekitar, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai peran Pokdarwis serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama penelitian oleh Rindiani Nurfahima dan Pawennari Hijjang (2022) tentang Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pulau Tilan Dalam Pengembangan Desa Wisata Pulau Tilan, dengan tujuan menjelaskan peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal melalui lima dimensi, yaitu ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, di mana peneliti tinggal bersama masyarakat selama dua bulan untuk memahami praktik pengelolaan wisata secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis Pulau Tilan berperan dalam pengembangan usaha dan UMKM lokal, seperti lapak kuliner, parkir, dan paket souvenir; pemberdayaan nelayan, pemuda, dan koperasi perempuan; pengelolaan ekowisata berbasis hutan lindung; serta pelestarian budaya melalui Festival Pulau Tilan. Pada aspek lingkungan, Pokdarwis terlibat dalam kegiatan konservasi seperti penanaman pohon, adopsi pohon, gotong royong rutin, dan

pengelolaan sampah. Dalam dimensi politik, Pokdarwis membangun jejaring dengan BUMKep, perusahaan melalui program CSR, dan pemerintah daerah untuk pembangunan sarana wisata, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan dana, akses penyeberangan, kualitas SDM pariwisata, dan rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap sektor wisata.

Persamaan penelitian ini dengan kajian tentang peran Pokdarwis di Wisata Gunung Padang terletak pada fokus Pokdarwis sebagai penggerak utama pengembangan destinasi, penguatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan konservasi lingkungan. Perbedaannya, Pulau Tilan merupakan desa wisata ekowisata sungai-hutan dan kawasan hutan lindung, sedangkan Gunung Padang adalah destinasi bukit di wilayah perkotaan pesisir dengan karakter wisata harian, tekanan kunjungan tinggi, serta keterkaitan erat dengan jaringan pariwisata Kota Padang. Oleh karena itu, penelitian ini berpeluang memperluas kajian tata kelola Pokdarwis dalam konteks wisata bukit perkotaan.

Penelitian Wahyu (2023) mengkaji Peran Pokdarwis Dalam Pengembangan Desa Wisata Latimojong dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tantangan dan peluang yang dihadapi Pokdarwis serta kontribusinya terhadap pengembangan usaha kuliner dan kerajinan masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tahapan analisis reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan pada aspek penyadaran (rendahnya SDM dan dukungan pemerintah desa), pengkapasitasan (keterbatasan

pengetahuan dan keahlian pariwisata), serta pendayaan (terbatasnya sarana dan status lahan wisata). Meski demikian, Pokdarwis berperan aktif dalam memfasilitasi usaha kuliner, mengedukasi masyarakat terkait kebersihan dan pelayanan, mempromosikan produk lokal, serta mengembangkan kerajinan sebagai souvenir pendakian. Pokdarwis juga menginisiasi berbagai atraksi baru seperti wisata gunung, Sivin Camp, river tubing, dan air terjun yang berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan.

Persamaan dengan penelitian di Gunung Padang terletak pada peran Pokdarwis sebagai fasilitator, edukator, dan penggerak ekonomi kreatif pada destinasi berbasis alam. Perbedaannya, Latimojong merupakan desa pegunungan dengan keterbatasan akses dan infrastruktur, sedangkan Gunung Padang berada di kawasan kota dengan akses mudah, profil wisatawan beragam, dan tekanan kunjungan yang lebih tinggi. Hal ini membuka ruang kajian mengenai strategi Pokdarwis dalam mengelola wisata alam di konteks perkotaan.

Penelitian oleh Hayati Husna dan Gusril Basir (2024) menganalisis Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Di Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan fokus pada empat peran utama, yaitu fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk melihat pengaruh Pokdarwis terhadap pengelolaan destinasi dan UMKM lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis berperan dalam membuka lapangan kerja, memfasilitasi investasi masyarakat, melibatkan warga dalam pelatihan pariwisata, membangun jaringan

kerja dengan pemerintah dan lembaga terkait, serta mengelola destinasi melalui fungsi manajemen. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur, promosi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi sebagian anggota dan masyarakat.

Persamaannya dengan penelitian di Gunung Padang terletak pada fokus peran kelembagaan Pokdarwis sebagai pengelola dan perwakilan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Perbedaannya, Nagari Koto Kaciak menghadapi persoalan rendahnya kunjungan wisatawan, sedangkan Gunung Padang justru mengalami peningkatan kunjungan sehingga memunculkan isu penataan ruang, pengelolaan arus wisata, dan keberlanjutan destinasi.

Penelitian Hidayat dkk. (2025) Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata Lendang Ara, Lombok Tengah. Dengan tujuan menganalisis peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata menggunakan pendekatan SWOT. Penelitian ini menyoroti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan potensi wisata desa yang berbasis alam dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pokdarwis memiliki kekuatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan peluang peningkatan pendapatan melalui pariwisata, namun masih menghadapi kelemahan pada kapasitas SDM dan dukungan lintas pihak dalam menghadapi ancaman persaingan destinasi dan perubahan lingkungan. Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya penguatan kerjasama dan peningkatan kapasitas strategis Pokdarwis.

Persamaannya dengan penelitian di Gunung Padang terletak pada penggunaan analisis peran Pokdarwis sebagai aktor kunci pengembangan wisata.

Perbedaannya, Lendang Ara merupakan desa wisata pedesaan, sedangkan Gunung Padang berada di kawasan wisata kota pesisir. Pendekatan SWOT ini dapat diadaptasi untuk memetakan posisi Pokdarwis Gunung Padang dalam menghadapi tantangan khas wisata perkotaan.

Selanjutnya penelitian oleh Idris dkk. (2025) tentang Pokdarwis: Garda Depan Pariwisata Lokal yang menyoroti Pokdarwis Desa Sanrobone, Takalar, sebagai garda depan pengembangan pariwisata lokal melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penguatan kapasitas Pokdarwis dalam manajemen destinasi, pemasaran digital, penyusunan paket wisata, dan pelayanan wisatawan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan Pokdarwis dalam mengelola atraksi, menyusun paket wisata terpadu, dan memanfaatkan media sosial untuk promosi, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa, UMKM, dan masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap penguatan kapasitas Pokdarwis dan kolaborasi multipihak. Perbedaannya, Sanrobone berfokus pada wisata bahari desa pesisir, sedangkan Gunung Padang memiliki karakter kombinasi wisata bukit, laut, sejarah, dan budaya kota. Penelitian ini berpeluang mengkaji bagaimana Pokdarwis Gunung Padang mengelola dan mengemas potensi tersebut dalam konteks destinasi perkotaan.

F. Kerangka Pemikiran

Pariwisata merupakan bagian dari proses pembangunan sosial yang kompleks, bukan sekadar aktivitas rekreasi atau kunjungan wisata semata (Pitana & Diarta, 2009). Di dalamnya terdapat berbagai pihak yang saling berhubungan:

masyarakat lokal yang hidup di sekitar destinasi, pemerintah yang menyusun kebijakan dan program, pelaku usaha yang memanfaatkan peluang ekonomi, serta wisatawan yang membawa nilai, gaya hidup, dan ekspektasi dari luar (Pitana & Gayatri, 2005). Pertemuan beragam aktor ini selalu terjadi dalam ruang sosial yang punya sejarah, budaya, dan makna tertentu bagi masyarakat setempat. Dalam konteks Gunung Padang, kawasan perbukitan di muara Batang Arau bukan hanya dipahami sebagai “objek wisata” yang menawarkan pemandangan alam, tetapi juga sebagai ruang hidup yang sejak lama berkaitan dengan aktivitas pelabuhan, pertahanan kolonial, kisah sastra Sitti Nurbaya, dan praktik kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir (Amran, 1988). Ketika pariwisata berkembang di Gunung Padang, yang berubah bukan hanya jumlah wisatawan dan pemasukan ekonomi, tetapi juga cara masyarakat memaknai ruang, mengatur aktivitas, dan menjalin hubungan dengan pihak luar.

Dalam kerangka pembangunan, pariwisata yang terus tumbuh membawa dua wajah sekaligus: di satu sisi membuka peluang ekonomi, di sisi lain berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial budaya (UNWTO, 2004). Karena itu, prinsip pariwisata berkelanjutan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini. Prinsip tersebut menekankan bahwa pengembangan destinasi seharusnya menjaga keseimbangan antara tiga aspek utama: manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan agar sumber daya alam tidak rusak atau habis dieksploitasi, dan keberlanjutan sosial budaya sehingga identitas lokal tidak terpinggirkan (Pedoman Desa Wisata, 2021). Dalam konteks Gunung Padang, ini berarti bahwa peningkatan kunjungan wisatawan dan

pemanfaatan kawasan untuk berbagai kegiatan rekreasi tidak boleh mengorbankan kelestarian hutan bukit, kenyamanan warga Batang Arau, maupun nilai-nilai budaya yang melekat pada kawasan tersebut. Dengan kerangka ini, pengembangan pariwisata dipandang bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai alat yang perlu diarahkan agar selaras dengan kepentingan jangka panjang masyarakat lokal.

Untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diupayakan di tingkat tapak, penelitian ini menggunakan pendekatan *Community Based Tourism (CBT)*. CBT muncul sebagai kritik terhadap model pengembangan pariwisata yang terlalu terpusat pada pemerintah atau investor besar, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau tenaga kerja di level bawah (Suansri, 2003). CBT justru menekankan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata. Esensinya, masyarakat bukan hanya diminta “ikut membantu”, tetapi diajak terlibat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan program, sampai menikmati dan mengelola hasil yang diperoleh. Prinsip CBT mencakup beberapa hal penting: partisipasi penuh masyarakat dalam pengambilan keputusan, penguatan kapasitas agar komunitas mampu mengelola destinasi secara mandiri, pembagian manfaat yang adil, dan perlindungan terhadap lingkungan serta budaya lokal (Kemenparekraf RI, 2012).

Dengan menggunakan CBT, pengembangan Wisata Gunung Padang dipahami sebagai proses yang seharusnya berjalan dari bawah, dengan warga Batang Arau sebagai aktor utama. Keterlibatan warga diharapkan tidak terbatas pada aktivitas teknis seperti menjaga parkir atau berjualan makanan, tetapi juga

dalam menentukan arah pengembangan kawasan: jenis atraksi apa yang pantas dan sesuai, bagaimana mengelola sampah dan kebersihan, bagaimana mengatur lalu lintas pengunjung agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari, dan bagaimana memaknai sejarah serta cerita lokal dalam paket wisata (Suansri, 2003). Dalam konteks ini, pertanyaan yang ingin dijawab penelitian bukan hanya apakah masyarakat ikut terlibat, melainkan bagaimana bentuk keterlibatan itu diatur, siapa saja yang mendapat ruang untuk aktif, dan seberapa besar masyarakat lokal bisa mempengaruhi keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.

Untuk menjembatani prinsip CBT tersebut dengan kenyataan di lapangan, penelitian ini menempatkan Pokdarwis Gunung Padang sebagai fokus utama. Pokdarwis dipahami sebagai kelembagaan lokal yang dibentuk untuk mengorganisasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata (Kemenparekraf RI, 2012). Di satu sisi, Pokdarwis merupakan hasil kesepakatan warga dan pemerintah setempat yang ingin memiliki wadah resmi bagi keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata. Di sisi lain, Pokdarwis adalah bagian dari struktur kelembagaan formal yang diatur melalui berbagai pedoman dan kebijakan pemerintah (Rahim, 2012). Dengan demikian, Pokdarwis berada di posisi tengah: ia harus berhadapan dengan harapan dan tuntutan dari atas (pemerintah, regulasi, program) sekaligus mengelola aspirasi dan kebutuhan dari bawah (masyarakat yang hidup berdampingan dengan destinasi).

Untuk membaca posisi dan fungsi Pokdarwis ini, penelitian menggunakan teori peran (role theory) yang dikemukakan Ralph Linton. Dalam teori ini, Linton

(1936) membedakan dua hal penting: status dan peran. Status adalah posisi sosial yang dimiliki seseorang atau satu lembaga dalam struktur masyarakat, sementara peran adalah segala hal yang diharapkan dilakukan dari posisi tersebut meliputi hak, kewajiban, dan pola perilaku. Dengan kata lain, status menjelaskan “di mana” Pokdarwis ditempatkan dalam sistem sosial, sedangkan peran menjelaskan “apa yang seharusnya dilakukan” Pokdarwis dalam sistem tersebut. Menggunakan kerangka ini, status Pokdarwis Gunung Padang dapat dipahami sebagai lembaga lokal yang memiliki pengakuan formal dari pemerintah dan sekaligus diakui secara sosial oleh masyarakat sebagai pengelola wisata (Linton, 1936; Soekanto, 2002). Dari status tersebut, muncul seperangkat peran yang secara ideal dilekatkan pada Pokdarwis.

Secara normatif dan ideal, Pokdarwis Gunung Padang diharapkan menjadi motor penggerak pengembangan wisata berbasis komunitas. Berdasarkan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (Kemendikbud RI, 2012), secara garis besar Pokdarwis memiliki peran sebagai:

1. Penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona di lingkungan destinasi;
2. Mitra pemerintah dalam perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata di daerah;
3. Penggerak peningkatan pengetahuan dan wawasan anggota di bidang kepariwisataan;
4. Pendorong dan pemotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan;

5. Pengumpul, pengolah, dan penyedia layanan informasi kepariwisataan;
6. Pemberi masukan kepada aparat pemerintah dalam pengembangan pariwisata daerah (Kemenparekraf RI, 2012).

Peran-peran ini secara ideal dijalankan melalui kegiatan mengembangkan atraksi wisata yang sesuai dengan potensi dan karakter kawasan, mengorganisasi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, mempromosikan destinasi melalui berbagai media, serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan (Hidayat, 2019). Dalam teori peran, semua harapan ini dapat disebut sebagai 'peran ideal' Pokdarwis, yakni gambaran mengenai bagaimana seharusnya lembaga tersebut berfungsi menurut dokumen kebijakan, pedoman kelembagaan, dan harapan para pemangku kepentingan.

Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan cerita yang lebih rumit. Peran yang sungguh-sungguh dijalankan sehari-hari oleh Pokdarwis yang dalam teori peran dapat disebut sebagai “peran faktual” sering kali terbatas oleh berbagai kondisi. Tidak semua anggota memiliki waktu dan sumber daya yang sama; sebagian harus tetap fokus pada pekerjaan utama demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Anggaran dan fasilitas yang dimiliki Pokdarwis juga tidak selalu memadai untuk menjalankan semua program yang diidealkan. Selain itu, keputusan penting terkadang masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah atau

dukungan pihak luar, sehingga ruang gerak Pokdarwis dalam menentukan arah pengembangan wisata menjadi terbatas (Pricillia, 2023; Lestari et al., 2025).

Di sisi lain, Pokdarwis juga berada di tengah tarik-menarik kepentingan. Pemerintah cenderung mendorong peningkatan kunjungan wisata sebagai indikator keberhasilan, pelaku usaha menginginkan keuntungan ekonomi yang lebih besar, sementara masyarakat menginginkan kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan hidup di sekitar destinasi (Yatmaja, 2019; Wiyono & Fitriyah, 2025). Dalam kondisi seperti ini, Pokdarwis harus menegosiasikan berbagai kepentingan tersebut. Mereka tidak hanya mengurus hal-hal teknis seperti jadwal kegiatan dan kebersihan, tetapi juga ikut menentukan sejauh mana kawasan boleh dimanfaatkan dan sejauh mana perlu dijaga, kapan aktivitas wisata dianggap mengganggu warga, dan bagaimana menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Karena itu, kerangka berpikir penelitian ini tidak berhenti pada level “apa tugas Pokdarwis menurut aturan”, tetapi bergerak ke pertanyaan: bagaimana peran-peran itu dijalankan, dinegosiasikan, dan kadang-kadang juga digagalkan oleh kondisi sosial dan struktural yang ada. Pariwisata berkelanjutan memberi arah nilai bagi pengembangan destinasi (UNWTO, 2004), CBT menjelaskan mengapa masyarakat perlu ditempatkan sebagai aktor utama (Suansri, 2003), dan teori peran Linton dipakai sebagai pisau analisis untuk membaca hubungan antara status formal Pokdarwis dan peran faktual yang mereka jalankan untuk mengembangkan Objek Wisata Gunung Padang (Linton, 1936). Melalui rangkaian pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk memahami secara lebih dalam bagaimana peran Pokdarwis

Gunung Padang dikonstruksi dan dijalankan dalam praktik, bagaimana keterlibatan masyarakat lokal diwujudkan melalui lembaga ini, serta hambatan dan tantangan apa saja yang menyebabkan kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dan peran faktual yang terjadi di lapangan, beserta dampaknya terhadap keberlanjutan pariwisata dan kehidupan sosial masyarakat Batang Arau.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memungkinkan peneliti mendeskripsikan dan menganalisis kehidupan masyarakat dalam konteks pemberdayaan pariwisata berkelanjutan secara mendalam. Pendekatan kualitatif merupakan strategi penelitian yang didasarkan pada metodologi khusus untuk mengkaji permasalahan manusia dan fenomena sosial. Dalam pendekatan ini, peneliti mengembangkan asumsi holistik yang kompleks, menganalisis data berupa kata-kata dan narasi, serta menginterpretasikan berbagai perspektif informan secara detail melalui studi yang dilakukan langsung pada waktu, kondisi, dan lokasi di mana fenomena tersebut berlangsung (Creswell, 2015:415).

Metode kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam memahami dinamika sosial dan proses pemberdayaan masyarakat yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap pengalaman dan makna yang dikonstruksi oleh para pelaku di lapangan. Studi kasus adalah metode penelitian yang dirancang untuk mengkaji kehidupan dan fenomena kontemporer secara mendalam, dengan mengumpulkan data yang komprehensif dan terperinci melalui berbagai sumber seperti informan

kunci, observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen, rekaman audio-visual, dan laporan pendukung lainnya. Metode studi kasus dibangun berdasarkan pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif, yaitu "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi.

Karakteristik utama studi kasus adalah fokusnya pada fakta empiris di lapangan tanpa manipulasi atau rekayasa kejadian, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Prosedur penelitian studi kasus mengandalkan teknik purposive sampling untuk memilih kasus atau isu yang relevan, kemudian mengkajinya secara holistik dengan mempertimbangkan aspek temporal, situasional, dan lokasional di mana fenomena tersebut berkembang (Creswell, 2015:9-10).

Penerapan pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kasus-kasus spesifik yang berkembang dalam masyarakat melalui teknik pengumpulan data yang detail dan mendalam (Creswell, 2015:135). Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk memberikan batasan yang jelas terhadap fokus penelitian melalui spesifikasi tempat dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji tema penelitian secara lebih terarah dan intensif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Objek Wisata Gunung Padang, yang terletak di Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, tidak hanya menyajikan pesona alam Gunung

Padang yang indah, tetapi juga menyimpan nilai sejarah yang kuat. Di kawasan ini terdapat peninggalan masa kolonial Jepang berupa bunker, makam yang dipercaya sebagai makam Siti Nurbaya, Taman Siti Nurbaya, serta ikon kota berupa tulisan Padang Kota Tercinta yang menjadi daya tarik wisata sekaligus simbol kebanggaan masyarakat.

3. Informan

Pada kajian ini peneliti menerapkan pendekatan purposive sampling akan menjelaskan bagaimana kelompok, masyarakat/ organisasi tersebut mampu menyampaikan data terkini dan valid dalam persoalan yang diteliti. Menurut Plummer (1983), terdapat berbagai pilihan yang bisa dipilih oleh peneliti seperti informan dengan kategori; informan biasa, dan informan kunci (Creswell, 2015:215). Adapun kriteria umum informan dalam penelitian ini adalah:

- mengetahui keberadaan dan aktivitas Pokdarwis Gunung Padang;
- pernah terlibat langsung atau berhubungan dengan pengelolaan Objek Wisata Gunung Padang;
- mampu memberikan informasi secara lisan mengenai kegiatan, peran, hambatan, dan dinamika pengembangan wisata;
- bersedia diwawancarai dan memberikan data yang dibutuhkan peneliti.

Pada penelitian ini terbagi menjadi 2 kategori informan, antara lain:

- a. Informan Kunci ialah orang yang tahu dan memahami terhadap topik masalah penelitian yang dilakukan, hingga mampu memberikan penjelasan mendalam terkait informasi yang dibutuhkan di lapangan (Koentjaraningrat, 1990: 164). Kriteria informan kunci dalam penelitian ini adalah pengurus atau anggota aktif pokdarwis gunung padang dan pihak kelurahan yang mengetahui proses perkembangan Pokdarwis. Berikut data informan kunci :

Tabel 1. 1 Daftar Nama Informan Kunci

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Bhilu	27 Tahun	Ketua Pokdarwis Gunung Padang
2.	Sari	41 Tahun	Bendahara Pokdarwis Gunung Padang
3.	Intan	28 Tahun	Sekretaris Pokdarwis Gunung Padang
4.	Maulana	21 Tahun	Anggota Pokdarwis Gunung Padang
5.	Habil	20 Tahun	Anggota Pokdarwis Gunung Padang

- b. Informan Biasa adalah individu atau pihak yang mengetahui dan mampu memberikan informasi atau data yang bersifat umum mengenai topik penelitian, namun tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas utama objek yang diteliti (Koentjaraningrat, 1990:165). Kriteria informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar kawasan wisata yang mengetahui perkembangan Gunung Padang. Adapun informan biasa dari penelitian ini :

Tabel 1. 2 Daftar Nama Informan Biasa

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1.	Slamet	60 Tahun	Nelayan
2.	Rudi	37 Tahun	Petugas Loker
3.	Syamsuari	70 Tahun	pedagang
4.	Febri	35 Tahun	Ketua RW
5.	Yuyun	40 Tahun	Terapis Bayi

4. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi menjadi salah satu teknik penting dalam penelitian kualitatif karena memberikan gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan. Menurut Creswell (2017:254), observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan ketika peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati berbagai aktivitas, perilaku, dan interaksi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pengamat aktif yang mencatat fenomena sosial yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang dicari melalui observasi dalam penelitian ini meliputi kondisi fisik dan fasilitas kawasan wisata Gunung Padang, aktivitas wisata yang berlangsung di lapangan, keterlibatan anggota Pokdarwis dalam pengelolaan kawasan, bentuk partisipasi masyarakat sekitar, kondisi kebersihan, pemeliharaan lingkungan, dan interaksi antara pengunjung dengan pengelola kawasan. Adapun data yang telah

diperoleh melalui observasi antara lain adalah gambaran mengenai akses menuju puncak Gunung Padang, kondisi tangga dan jalur tracking, keberadaan bunker, meriam, Taman Siti Nurbaya, tulisan ikon kota, aktivitas pengunjung di kawasan wisata, bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi wisata, serta aktivitas Pokdarwis dalam menjaga kebersihan dan mendukung kegiatan wisata di kawasan tersebut. Observasi juga membantu peneliti melihat bahwa pengelolaan kegiatan wisata di lapangan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar dan anggota Pokdarwis dalam praktik sehari-hari.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik utama dalam penelitian kualitatif karena melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Koentjaraningrat (1994:129) menjelaskan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara tatap muka untuk menggali informasi, pandangan, serta pengalaman informan secara lebih rinci dan kontekstual.

Melalui teknik ini, peneliti dapat memahami cara pandang informan terhadap peran, praktik, dan dinamika yang terjadi dalam pengelolaan pariwisata. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan kunci seperti ketua Pokdarwis, pengurus Pokdarwis, pihak Dinas Pariwisata Kota Padang, serta masyarakat di sekitar kawasan

Wisata Gunung Padang. Wawancara diarahkan untuk memperoleh data mengenai peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata, bentuk partisipasi masyarakat, pola kerja sama antar aktor, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan destinasi Wisata Gunung Padang.

Dari hasil wawancara, peneliti telah memperoleh data mengenai proses pembentukan Pokdarwis melalui musyawarah masyarakat dan instansi setempat, penetapan Pokdarwis melalui Surat Keputusan Dinas Pariwisata Kota Padang, visi dan misi Pokdarwis, struktur kepengurusan, pengembangan paket wisata seperti edutrip “Pahlawan Hutan”, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata, bentuk promosi melalui media sosial, kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain, serta berbagai hambatan seperti keterbatasan anggota aktif, keterbatasan pendanaan, dan belum meratanya partisipasi warga sekitar. Selain itu, dari wawancara dengan masyarakat dan pihak Dinas Pariwisata, peneliti juga mendapatkan gambaran mengenai manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas wisata dan pandangan mereka terhadap peran Pokdarwis dalam mengembangkan kawasan Gunung Padang.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara. Menurut Moleong (2017:216), dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengkajian terhadap

bahan-bahan tertulis, gambar, atau rekaman yang berhubungan dengan peristiwa atau aktivitas yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, serta memberikan bukti konkret mengenai situasi lapangan.

5. Analisa Data

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan, dimulai sejak tahap awal pengumpulan data hingga pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan akhir. (Miles & Huberman, 1992:16). Miles dan Huberman (1992:17) menyatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga komponen ini berjalan secara interaktif dan simultan, artinya proses analisis tidak dilakukan secara terpisah, melainkan saling memengaruhi satu sama lain (Miles & Huberman, 1992:17). Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dari lapangan dapat diorganisasi, disaring, dan diinterpretasikan secara sistematis sehingga menghasilkan temuan yang bermakna (Miles & Huberman, 1992:18).

a. Reduksi Data

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan (Miles & Huberman, 1992:18). Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, membuang informasi

yang tidak sesuai, serta mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu (Miles & Huberman, 1992:18). Reduksi data membantu peneliti menyusun struktur analisis yang lebih jelas dan mengarahkan proses pengolahan data selanjutnya.

Selanjutnya, reduksi data tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 1992:19). Setiap kali data baru diperoleh melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi, peneliti meninjau kembali hasil temuan sebelumnya agar data yang dikumpulkan tetap konsisten dengan tujuan penelitian (Miles & Huberman, 1992:19). Dengan demikian, reduksi data berfungsi sebagai dasar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih tajam terhadap fenomena yang diteliti dan memperjelas fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Tahap kedua adalah penyajian data (data display), yaitu proses menyusun sekumpulan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis (Miles & Huberman, 1992:19). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari hasil reduksi (Miles & Huberman, 1992:19). Bentuk penyajian data dapat berupa teks naratif, tabel, bagan, grafik, atau matriks yang menggambarkan keterkaitan antar kategori informasi.

Dalam konteks penelitian ini, penyajian data digunakan untuk memperjelas hasil wawancara dan observasi di lapangan, terutama yang

berkaitan dengan peran Pokdarwis dalam pemberdayaan masyarakat (Miles & Huberman, 1992:20). Melalui penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat membandingkan pandangan antar informan, mengidentifikasi pola interaksi sosial, serta memahami konteks dinamika yang terjadi di lingkungan penelitian (Miles & Huberman, 1992:20). Dengan demikian, penyajian data berperan penting dalam menjembatani data mentah menuju proses interpretasi makna.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification), yaitu proses penafsiran makna terhadap data yang telah disajikan (Miles & Huberman, 1992:21). Peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data, yang kemudian diverifikasi melalui proses pengecekan ulang terhadap data lapangan (Miles & Huberman, 1992:21). Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas empiris dan bukan hasil asumsi subjektif peneliti.

Proses verifikasi ini berlangsung terus-menerus selama penelitian, sehingga kesimpulan akhir yang dihasilkan bersifat kredibel dan valid (Miles & Huberman, 1992:22). Dengan kata lain, tahap ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol kualitas dalam analisis data kualitatif. Hasil akhir dari tahap ini berupa temuan penelitian yang memiliki kekuatan ilmiah dan mampu menjawab rumusan masalah secara komprehensif (Miles & Huberman, 1992:22).

H. Proses Jalannya Penelitian

Penelitian ini diawali dengan proses bimbingan yang dimulai pada bulan Juli 2025. Pada tahap awal ini, peneliti mulai merancang topik penelitian serta melakukan diskusi dengan dosen pembimbing terkait fokus kajian yang akan diteliti. Dalam proses bimbingan tersebut, peneliti mengembangkan ide penelitian mengenai peran Pokdarwis dalam pengembangan pariwisata di kawasan Gunung Padang. Tahap ini menjadi penting karena membantu peneliti dalam memperjelas arah penelitian, menentukan rumusan masalah, serta menyusun kerangka pemikiran yang sesuai dengan kajian antropologi.

Setelah melalui beberapa kali proses bimbingan dan perbaikan, peneliti melaksanakan seminar proposal pada bulan Desember 2025. Seminar proposal ini menjadi tahap penting untuk mendapatkan masukan dari dosen penguji terkait kelayakan penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Dalam proses seminar tersebut, peneliti memperoleh berbagai saran dan kritik yang kemudian menjadi bahan perbaikan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Perbaikan ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan di lapangan dapat lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Setelah menyelesaikan revisi proposal, peneliti mulai mempersiapkan diri untuk turun ke lapangan pada bulan Januari 2026. Tahap awal yang dilakukan adalah mengurus perizinan penelitian. Peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian dari fakultas sebagai syarat administratif untuk melakukan penelitian. Setelah memperoleh surat dari fakultas, peneliti kemudian melanjutkan proses perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan izin penelitian ke tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai bentuk pemberitahuan sekaligus permohonan izin untuk melakukan penelitian di wilayah tersebut.

Proses pengurusan izin ini menjadi bagian penting dalam penelitian, karena dengan adanya izin resmi, peneliti dapat lebih mudah mengakses data serta menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, melalui proses ini peneliti juga mulai melakukan pendekatan awal dengan pihak kelurahan dan masyarakat setempat, sehingga memudahkan proses pengumpulan data pada tahap berikutnya.

Memasuki bulan Februari 2026, peneliti mulai melakukan pengumpulan data lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan. Wawancara dilakukan kepada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata Gunung Padang, seperti anggota Pokdarwis, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak terkait lainnya. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara formal, tetapi juga melakukan pendekatan secara informal untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selama proses pengumpulan data, peneliti juga mengalami beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian. Atas saran dari pihak kecamatan, peneliti kemudian diarahkan untuk meminta data tambahan ke Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil (Dukcapil). Langkah ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, khususnya terkait kondisi demografi masyarakat yang menjadi bagian penting dalam analisis penelitian.

Secara keseluruhan, proses penelitian ini berlangsung secara bertahap, mulai dari tahap perencanaan, perizinan, hingga pengumpulan data di lapangan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran penelitian. Melalui proses ini, peneliti tidak hanya memperoleh data yang dibutuhkan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami dinamika sosial masyarakat serta peran berbagai aktor dalam pengembangan pariwisata di Gunung Padang.

